

RINGKASAN

ARYA PARNAUNGAN SIREGAR
NIM : 200510232

Pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh calon legislatif (Studi penelitian di Kabupaten Labuhanbatu)
Nuribadah S.H., M.H., dan Johari S.H., M.H.

Penelitian ini membahas pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh calon legislatif berupa pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, pemasangan APK harus memenuhi ketentuan lokasi, waktu dan ukuran tertentu. Namun, di Kabupaten Labuhanbatu masih ditemukan banyak pelanggaran, seperti pemasangan APK di tempat ibadah, fasilitas umum, jalan-jalan protokol, dan di pepohonan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi pelanggaran pemilu dalam pemasangan alat peraga kampanye serta upaya penyelesaiannya. Dengan dua pokok permasalahan yaitu bagaimanakah penerapan sanksi pelanggaran pemilu pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif serta apa kendala dan upaya dalam penegakan hukum pelanggaran pemilu pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif di Kabupaten Labuhanbatu.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan kasus, sifat penelitian yaitu deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer serta adanya responden dan informan.. Teknik analisis data dilakukan dengan teknik kualitatif, mengumpulkan data dengan cara seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terkait pemasangan APK di Kabupaten Labuhanbatu masih relatif minim dan belum efektif. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu pada umumnya hanya melakukan pemanggilan terhadap para caleg yang melakukan pelanggaran dan penertiban APK, tanpa adanya sanksi yang lebih tegas. Kendala utama dalam penegakan hukum antara lain terbatasnya penindakan hukum lanjutan setelah pencabutan APK serta rendahnya kesadaran hukum dari peserta pemilu.

Saran diperlukan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu meningkatkan upayanya dalam mengedukasi para calon legislatif tentang peraturan dan konsekuensi terhadap pelanggaran pemilu, serta menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap para calon legislatif yang melakukan pelanggaran pemasangan APK di Kabupaten Labuhanbatu.

Kata kunci: Pelanggaran , pemilu, calon legislatif, alat peraga kampanye.

SUMMARY

**ARYA PARNAUNGAN
SIREGAR**

NIM : 200510232

***Election crimes committed by legislative candidates
(Research study in Labuhanbatu Regency)***

Nuribadah S.H., M.H., and Johari S.H., M.H.

This study discusses election crime committed by legislative candidates in the form of installing campaign props that don't comply with applicable provisions. Based on Law Number 7 of 2017 concerning General Election and Regulation of the General Election Commission Number 15 of 2023 concerning General Election Campaign, the installation of campaign props must meet certain locations, time, and size requirements. But, in Labuhanbatu, many violations are still found, such as the installation of campaign props in places of worship, public facilities, protocol roads, and in trees.

This study aims to determine and explain the application of criminal sanctions for election in the installation of campaign props and efforts to resolve them. With two main problems, namely how to apply sanctions for criminal sanctions for election in the installation of campaign props carried out by legislative candidates and what obstacles and efforts are in enforcing the law on criminal sanctions for election in the installation of campaign props carried out by legislative candidates.

This study uses empirical legal research. The approach used is the statutory approach (Statute Approach) and cases, the nature of the research is descriptive analytical. The data used is secondary data consisting of primary and tertiary. Data analysis techniques are carried out using qualitative techniques, collecting data by means such as observation, interviews and documentation.

The results of the study show that the application of criminal sanctions related to the installation of APK in Labuhanbatu Regency is still relatively minimal and ineffective. The Bawaslu of Labuhanbatu Regency generally only summons legislative candidates who violate and regulates APK, without any stricter sanctions. The main obstacles in law enforcement include limited follow-up legal action after the removal of APK and low legal awareness of election participants.

Suggestions are needed so that the Election Supervisory Agency (Bawaslu) needs to increase efforts in educating legislative candidates about the regulations and consequences of election violations, as well as implementing stricter sanctions against legislative candidates who commit violations by installing APK in Labuhanbatu Regency.

Key words: Criminal acts, elections, legislative candidates, campaign props.